



PERAN MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH PROVINSI JAMBI

Asna Ningsih^a, Suhar^b, Hansen Rusliani^c

^a Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah, Asnaningsi3@gmail.com
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

^b Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah, Asnaningsi3@gmail.com
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

^c Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah, Asnaningsi3@gmail.com
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

This study aims to determine the activities and roles of the Islamic economic community and how the obstacles and constraints faced by the Islamic economic community in improving Islamic financial literacy. The method used in this research is descriptive qualitative research. The object of this research is BPH MES Jambi Province. The data sources used are primary data and secondary data. Data obtained directly from respondents by conducting data analysis methods, namely observation, interviews, and personal documentation, then the data was processed using data processing techniques. The results of this study indicate the activities carried out by MES, namely roadshow activities in the form of *muhadatsa*, and the role of MES in increasing public knowledge about the use of Islamic financial institutions in Indonesia. And the obstacles experienced by the Islamic economic community are the lack of optimal management in carrying out the work program and vision and mission that have been set..

Keywords: Islamic financial literacy, Islamic economic community

Abstrak

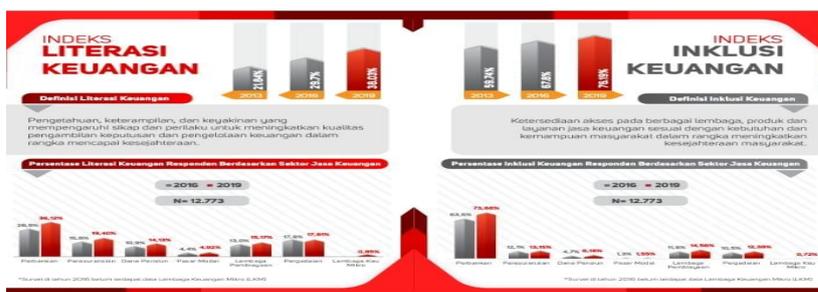
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan dan peran masyarakat ekonomi syariah serta bagaimana hambatan dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat ekonomi syariah dalam meningkatkan literasi keuangan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah BPH MES Provinsi Jambi. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data didapat langsung dari responden dengan melakukan metode analisis data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi secara personal, kemudian data diolah menggunakan teknik pengolahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh MES yaitu kegiatan *roadshow* berupa *muhadatsa*, dan adanya peran MES dalam peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dan hambatan yang dialami masyarakat ekonomi syariah yaitu kurang optimalnya pengurus dalam melaksanakan program kerja dan visi misi yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Literasi keuangan syariah, masyarakat ekonomi syariah

1. PENDAHULUAN

MES atau Masyarakat Ekonomi Syariah, dalam istilah Inggris dikenal dengan *Islamic Economic Society* adalah lembaga nirlaba yang didirikan dengan tujuan pengembangan serta menetapkan model ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi yang berlandaskan keadilan dan berbasis ekonomi syariah. Sejak didirikan pada 26 Maret 2001, MES telah berperan aktif mengedukasi serta memberikan sosialisasi ekonomi atau keuangan syariah pada masyarakat secara luas. Pendiri MES adalah individu, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, dan bisnis yang tertarik pada pengembangan ekonomi syariah. MES didasarkan pada Islam dan tersedia untuk semua warga negara karena mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di republik

Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk 208 juta jiwa, namun dengan sistem keuangan tradisional yang lebih unggul dari sistem keuangan syariah. Awalnya, MES khusus untuk DKI Jakarta. Meski demikian, program- program MES telah merangsang minat mitra serta komunitas lain dan ditemukan melakukan kegiatan serupa. Literasi keuangan menjadi isu yang hangat diperbincangkan pada beberapa tahun belakangan di Indonesia. Isu yang muncul ini tidak lepas dari berbagai polemik yang terjadi, mulai dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sampai pada krisis perekonomian yang pernah melanda Indonesia pada tahun 1998. Pada saat sekarang ini literasi keuangan merupakan hal yang penting dan menjadi kebutuhan bagi masyarakat luas, sehingga masyarakat dituntut harus tahu dan paham akan literasi keuangan tersebut¹. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) literasi keuangan merupakan rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), keyakinan (confidence), keterampilan (skill) konsumen dan masyarakat luas, sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Terhambatnya pembangunan ekonomi negara diakibatkan kurangnya akses ke lembaga keuangan, sehingga banyak masyarakat yang terjebak dalam modus kejahatan dari penjual produk-produk keuangan². Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Angka tersebut meningkat di banding hasil survei OJK 2016 yaitu indeks literasi keuangan 29,7% dan indeks inklusi keuangan 67,8%. Dengan demikian dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan pemahaman keuangan (literasi) masyarakat sebesar 8,33%, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 8,39%. Survei SNLIK OJK 2019 ini mencakup 12.773 responden di 34 provinsi dan 67 kota atau kabupaten dengan mempertimbangkan gender dan strata wilayah perkotaan atau perdesaan³.



Gambar 1.1

Indeks Literasi Keuangan OJK1

Berdasarkan hasil wawancara saat observasi awal bersama Sekretaris Umum Sucipto, MES adalah organisasi yang paling masif melakukan literasi dan juga memiliki hambatan. Yang pertama itu dari dana untuk melakukan kegiatan literasi. Yang kedua dari segi Manajemen SDM dikarenakan keterbatasan dana yang sedikit, sehingga kurangnya komunikasi pengurus daerah ke pengurus wilayah yang berakibat jarak yang jauh apalagi untuk di Kabupaten. Anggota kepengurusan MES wilayah atau daerah belum membentuk tim kesekretariatan serta belum juga memiliki sekretariat. Jumlah kepengurusan wilayah sekitar 80%, jumlah pengurus wilayah ada 2 negara dan jumlah pengurus daerah sekitar 60% tidak aktif dalam menjalankan kepemimpinan⁴.

MES yang merupakan organisasi ekonomi syariah terbesar telah memiliki pengurus wilayah, termasuk Provinsi Jambi. MES Perwakilan Wilayah Jambi didirikan pada Tahun 2020, dengan Ketua Umum pertama adalah Suaidi Asyari, dan Sekretaris Umum Sucipto. Akan tetapi pada laporan MES tahun 2020, MES Provinsi Jambi bukan termasuk kategori Lestari (memiliki kantor dan karyawan tetap), atau mobile (memiliki kantor atau karyawan tetap), melainkan masih perintis. Dalam hal program kerjanya, MES Provinsi Jambi telah berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah dalam bentuk sosialisasi dan talkshow yang diharapkan dapat mendorong tingkat literasi keuangan syariah kepada masyarakat Jambi.

Literasi keuangan syariah masyarakat Provinsi Jambi, khususnya Kota Jambi, masih tergolong rendah. Hal ini juga menjadi tantangan ketika lembaga keuangan syariah bermunculan dan mengalami peningkatan jumlah yang signifikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Provinsi Jambi”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

Organisasi dibidang ekonomi syariah dinamakan “Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah” yang disingkat dengan MES, sebutan dalam bahasa Indonesia adalah Masyarakat Ekonomi Syariah, dalam bahasa Inggris adalah Islamic Economic Society atau dalam bahasa arabnya Mujtama’ Al-Iqtishad Al-Islamy. Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah atau biasa disebut Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) merupakan sebuah organisasi yang bertujuan bertujuan untuk menjadi acuan dan model bagi upaya percepatan pengembangan dan penerapan sistem ekonomi Islam dan etika bisnis Islam di Indonesia.

2.2 Literasi Keuangan Syariah

Istilah literasi dalam bahasa latin disebut sebagai *Literatus* yang artinya adalah orang yang belajar. *National Institut for Literacy* sendiri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat. Selanjutnya *Education Development Center* (EDC) juga turut menjabarkan pengertian dari literasi, yaitu kemampuan individu untuk menggunakan potensi serta skill yang di milikinya, dan tidak sebatas hanya kemampuan baca tulis saja. Literasi pada awalnya diperuntukkan bagi mereka yang sedang belajar dan akrab dengan sastra⁵.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah orang-orang yang berkaitan dengan Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Jambi.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur riset yang memanfaatkan data dan fakta yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang akan diteliti.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)

Sumber Data

Sumber data berupa responden dan informan dikatakan juga sebagai sumber data berupa orang (*person*).

Metode Analisis Data

Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut⁶:

1. Reduksi Data (*Data Reductions*)

Pada tahap ini penulis merangkum jawaban dari informan Organisasi MES Provinsi Jambi, kemudian penulis mengelompokkan jawaban tersebut yang cocok untuk rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

2. Penyajian Data (*Displey Data*)

Pada tahap ini penulis menyajikan data tersebut pada rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian yang mana berupa narasi hasil analisis dan hasil penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclution Drawing Verifikasion*)

Tahap selanjutnya penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian, namun penarikan kesimpulan tersebut masih bersifat sementara, kemudian penulis melakukan verifikasi bukti-bukti yang menunjukkan hasil yang valid yang di dapat dari informasi oleh pengurus MES Povinsi Jambi, dan ketika dilakukan pengumpulan data kembali apabila jawaban dari informan tetap sama maka kesimpulan tersebut kredibel.

Metode Pengecekan Keabsahan Data

Tingkat kepercayaan data dilapangan perlu untuk dilakukan pemeriksaan keabsahan data yang dikenal dengan istilah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik gabungan dalam pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Hal itu dapat dilakukan melalui metode⁷:

1. Data hasil observasi dan data-data hasil wawancara dilakukan perbandingan.
2. Perkataan orang di depan umum dan secara pribadi dilakukan perbandingan.

3. Perkataan orang-orang tentang kondisi penelitian dan perkataan orang-orang sepanjang waktu diperbandingkan.
4. Kondisi dan sudut pandang seseorang rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan diperbandingkan.
5. Hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dilakukan perbandingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kegiatan Masyarakat Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah

Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah atau biasa disebut Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan mengembangkan dan membumikan sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berkeadilan dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Sifat MES adalah menjadi wadah yang diakui sebagai acuan dan diikuti sebagai teladan bagi usaha percepatan pengembangan dan penerapan sistem ekonomi dan etika bisnis syariah di Indonesia, mandiri, bukan organisasi pemerintah, serta bukan organisasi politik dan bukan merupakan bagian darinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sucipto selaku sekretaris MES Provinsi Jambi, beliau mengatakan:

“program-program yang ada di MES itu banyak bahkan kegiatan yang dilakukan oleh MES sangatlah rutin seperti halnya kegiatan *Muhadatsah*, yang mana kegiatan tersebut dilakukan hampir dua bulan sekali meskipun hanya melalui media zoom meeting atau live di youtube MES”⁴.

MES menjadi wadah yang inklusif dalam menghimpun seluruh sumber daya yang ada dan membangun sinergi antar pemangku kepentingan. Salah satu organisasi yang mumpuni dibidang pengembangan Keuangan Syariah adalah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Masyarakat Ekonomi Syariah adalah sebuah organisasi yang dalam akta pendirian bernama Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah dalam bahasa arab *Mujtama' aliqtishad al-islamiy* dan dalam bahasa inggris di sebut *Islamic Economic Society*. Masyarakat Ekonomi Syariah didirikan pada hari senin, tanggal 1 Muharram 1422 H atau bertepatan dengan tanggal 26 Maret 2001 M untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, oleh perorangan, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, lembaga kajian dan badan usaha yang mengembangkan ekonomi Islam.

a. *Muhadatsah* Dewan Pakar MES “Pengembangan ISF (Wakaf Produktif) Melalui Transformasi Digital Dan Penguatan Ekosistem: (Transformasi Perwakafan Menuju Ekonomi Berkelanjutan)”

Dewan Pakar Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (PP MES) kembali menyelenggarakan forum *Muhadatsah* Dewan Pakar edisi kedua pada Sabtu, 7 Agustus 2021 dengan mengangkat tema ”Pengembangan ISF (Wakaf Produktif) Melalui Transformasi Digital dan Penguatan Ekosistem: “Transformasi Perwakafan Menuju Ekonomi Berkelanjutan”⁴.

Tema tersebut diangkat untuk merespon sejumlah isu tantangan dalam mengoptimalkan potensi wakaf di Indonesia, diantaranya terkait strategi pengembangan wakaf produktif dengan memanfaatkan transformasi digital serta pembangunan ekosistem wakaf produktif yang komprehensif untuk pemberdayaan ekonomi umat. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo selaku Ketua Dewan Pakar PP MES yang hadir memberikan arahan menjelaskan terkait empat rancangan penting guna memobilisasi potensi wakaf produkti di Indonesia, yaitu merancang dan mengimplementasikan proyek keuangan sosial yang berdampak pada kemajuan ekonomi keuangan syariah secara umum, membentuk kolaborasi dan sinergi yang intens dengan sektor keuangan syariah komersial, mendesain digitalisasi pada proses penghimpunan dan penyaluran dari wakaf produktif, serta kampanye terstruktur dan terencana dengan melibatkan berbagai pihak. Kemudian beliau mengatakan “Semua itu perlu kita lakukan secara berjamaah agar wakaf produktif bisa menjadi instrumen keuangan yang dapat mendorong kesejahteraan secara berkelanjutan bagi umat”.

Hadir sebagai narasumber antara lain Ketua Dewan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia yang juga merupakan anggota Dewan Pembina PP MES; Mohammad Nuh, Ketua Forum Wakaf Produktif beliau mengatakan “Nadzir memiliki peran penting karena berperan sebagai jembatan yang menghubungkan wakif dan mauquf alaih. Oleh karena itu, kami telah menyediakan pusat pelatihan nadzir diberbagai universitas dan sertifikasi, agar nadzir dapat mengelola wakaf secara professional”. Dalam penyampaianya mengaku optimis dengan perkembangan wakaf produktif di Indonesia. Menurutnya sektor perwakafan di Indonesia telah memasuki era baru di mana semua pihak mulai berkontribusi dalam pengembangannya sehingga menjadi arus keuangan sosial yang berdampak secara parsial bagi masyarakat. Meski begitu

pihaknya menilai masih ada sejumlah tantangan terutama pada sisi pengelolaannya, oleh karena itu peran nadzir menjadi sangat penting.

Bobby mengatakan “Berbicara wakaf, program literasi dan edukasi yang inklusif menjadi agenda yang wajib dan perlu di lakukan secara konsisten”, dalam penyampaian materinya menjelaskan terkait minimnya literasi seputar wakaf di tengah masyarakat. Banyak masyarakat masih mengidentikan wakaf hanya pada 3 M, yaitu masjid, makam, madrasah, transformasi pada wakaf produktif, diantaranya pengembangan literasi yang komprehensif, transformasi pada proses fundraising, pentingnya manajemen yang berorientasi pada pengembangan aset, serta proses monitoring dan reporting pada aset wakaf.

b. *Muhadatsah* Dewan Pakar MES “Integrasi Ekosistem Usaha Syariah Sektor Halal Food Menuju Surga Kuliner Halal Dunia Melalui Integrasi Nilai Pasok”

Dewan Pakar Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (PP MES) kembali menyelenggarakan forum *Muhadatsah* Dewan Pakar MES pada Sabtu, 2 Oktober 2021 dengan tema “Integrasi Ekosistem Usaha Syariah Sektor Halal Food: Menuju Surga Kuliner Halal Dunia, melalui Integrasi Nilai Pasok”⁴. Hubungan kerja sama antara pelaku usaha syariah sektor pertanian (UMK) dengan industri makanan olahan masih sangat terbatas, umumnya hal ini disebabkan karena perbedaan kualitas produk yang diperlukan industri dengan hasil dari petani yang berkualitas rendah. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan terhadap proses budidaya, teknologi pasca panen, dan ketersediaan infrastruktur akibat dana yang terbatas untuk memenuhi standar yang baik.

Pelaku usaha besar cenderung lebih nyaman bekerja sama dengan para distributor atau pedagang pengumpul atau bahkan menyediakan sendiri bahan bakunya. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo selaku Ketua Dewan Pakar PP MES yang senantiasa hadir dalam forum *Muhadatsah* ini menyampaikan tiga arahnya terkait proses integrasi ekosistem halal. Pertama integrasi ekosistem usaha halal mulai dari proses produksi, keuangan, hingga pemasaran ketangan konsumen. Kedua mendorong integrasi aktivitas usaha antar pelaku usaha kecil. Ketiga memperkuat inovasi dan kreasi melalui digitalisasi. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan “yang sulit kita mudahkan, yang gelap kita terangkan melalui torbosan dan inovasi yang kita tuangkan dalam forum *Muhadatsah* ini”. Hal tersebut agar dapat mendorong kepada segenap dewan pakar MES untuk memanfaatkan forum *Muhadatsah* ini sebagai wadah untuk menuangkan terobosan yang inovatif dalam rangka mendukung penguatan integrasi ekosistem usaha halal. Hadir sebagai salah satu nara sumber yaitu CEO Kopontren Al-Ittifaq Bandung, Agus Setia Irawan Owner PT Halalan Thayyiban Puspo Wardoyo, beliau mengatakan “Kendala klasik yang masih kami temui adalah seputar persoalan modal, kebijakan, dan keberpihakan, namun kendala tersebut saat ini sedikit demi sedikit sudah bisa diatasi”. Dalam pemaparannya menjelaskan terkait peran komptren dalam mendorong pengembangan usaha ekosistem halal yang masih terkendala dengan beberapa problem klasik, serta rendahnya dukungan Reaserch and Development (RnD) Indonesia yang hanya berkisar 0.23% menjadi penghambat dalam tersendiri dalam pengembangan ekosistem usaha halal terutama pada sektor pertanian. Oleh karena itu, pihaknya mendorong penguatan RnD sehingga pengembangan produk yang akan diproduksi dapat melalui proses riset pasar untuk kemudian dilakukan penetrasi pasar secara mendalam dengan pemanfaatan teknologi baik dari hulu sampai ke hilirnya.

Penjaminan halal di Indonesia secara resmi diakui dan didukung negara dengan keluarnya UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Implikasi dari keluarnya UU ini adalah negara secara resmi mengakui dan menjamin Syariat Islam yang berupa kewajiban mengkonsumsi makanan halal dan thoyib. Selain itu, sertifikasi halal yang selama ini dilakukan oleh MUI beralih dilakukan oleh Lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama bernama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Munculnya UU tersebut dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini diharapkan memberikan kepastian informasi dan transparansi bagi para konsumen produk halal, sekaligus mendorong pertumbuhan pasar industri halal di Indonesia. Pengembangan industri atau produk halal di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya kegiatan sertifikasi halal pada makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk lainnya yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Sejak diterbitkannya UU RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dan PP RI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka kehalalan makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk lainnya yang semua hanya diatur dalam kitab fiqih kini diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah untuk pengaturan kehalalan produk. Dengan demikian maka mulai saat ini telah terjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen maupun produsen atas kehalalan

makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk halal lainnya. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan paradigma tersebut, jaminan kepastian hukum halal hasil produksi dan perlindungan terhadap konsumen maupun produsen selain menjadi tanggung jawab pribadi dan ulama, juga menjadi tanggung jawab pemerintah yang diamanatkan kepada Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

2. Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) merupakan organisasi Independen dan Nirlaba yang bergerak memasyarakatkan ekonomi Syariah. MES merupakan mitra kerja dari Industri Keuangan dalam mendongkrak *Market Share* keuangan Syariah yang ada di Indonesia. MES bermitra dengan berbagai lembaga termasuk pemerintah, asosiasi serta Industri dan berusaha untuk meningkatkan Literasi dan Inklusi keuangan Syariah di Indonesia terkhusus Asuransi Syariah. Program MES berfokus kepada peningkatan literasi dan juga diiringi dengan Inklusi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada ibu Rofiqoh selaku sekretaris lima, beliau mengatakan:

“sasaran utama dari MES sendiri adalah meratanya literasi masyarakat mengenai keuangan dan ekonomi Syariah di Provinsi Jambi”.⁸

Dari 8 pogram kerja MES Provinsi Jambi yang telah di susun dan dibentuk secara tersusun, ada beberapa yang sudah terlaksana sampai akhir Tahun 2021 lalu. Sedangkan ada juga beberapa program kerjanya masih belum terlaksana tetapi sudah direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2022 ini, adapun kegiatannya ialah kerjasama dengan dinas pendidikan Provinsi Jambi, melakukan festival ekonomi syariah, serta melakukan buka bersama dengan anak-anak panti asuhan Jambi. Kegiatan Sosialisasi maupun edukasi ini yang berkaitan tentang ekonomi syariah dengan tujuan agar masyarakat mempunyai pengetahuan yang lebih terhadap ekonomi syariah, dan program kerja yang akan mengadakan kerjasama dengan dinas pendidikan memiliki harapan bisa menambah kurikulum ekonomi syariah ditingkat SMA dan MA dengan tujuan agar ekonomi syariah itu tersosialisasi sampai kepelajar, karena diliat dimasyarakat ekonomi syariah itu lebih kepada masyarakat luas dan kepada mahasiswa saja terutama fakultas ekonomi. Dengan harapan ketika mereka telah lulus dari bangku sekolah mereka sudah mengetahui tentang ekonomi syariah, karena hal ini dianggap penting oleh organisasi MES Kalimantan Selatan agar mereka kedepannya bisa mengaplikasikannya dimasyarakat.

MES sejak awal merupakan lokomotif gerakan edukasi dan sosialisasi keuangan syariah kepada *public*. Rencana yang diadakan oleh OJK yang bekerjasama dengan MES pusat untuk membuat program pembangunan *literasi* keuangan syariah. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Jambi, dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif dan berkesinambungan. Sosialisasi dan edukasi akan berjalan lebih optimal jika dilakukan sinergi dengan berbagai *stakeholder*, tidak hanya oleh pemerintah atau pelaku industri saja, melainkan juga organisasi asosiasi atau bahkan melibatkan masyarakat secara langsung.

Dengan adanya program kerja Masyarakat ekonomi syariah diharapkan ada indikator perubahan baik dalam segi pengetahuan masyarakat maupun *aksesibilitas* yang sangat berpengaruh pada perkembangan masyarakat ekonomi syariah Provinsi Jambi terhadap lembaga keuangan bank atau non bank syariah:

- a) Perubahan pengetahuan masyarakat, dengan adanya organisasi masyarakat ekonomi syariah beserta kegiatan yang sudah dilaksanakannya di Jambi sangat membantu karena ada sebagian masyarakat muslim yang sudah mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah, karena dulunya mereka selalu bermuamalah secara konvensional tetapi pada masa ini, mereka berpindah ke sistem ekonomi syariah yang telah banyak membantu masyarakat dalam bermuamalah dan mendapatkan edukasi dan sosialisasi tentang ekonomi syariah secara mendalam serta mengetahui sistem ekonomi syariah oleh karena itu mereka ingin tegaknya nilai-nilai keadilan, kejujuran, transparansi, anti korupsi dan eksploitasi dengan cara mendukung serta mewujudkan visi dan misi dari MES. Selain dari itu ada juga persepsi masyarakat yang masih belum berubah karena masih menganggap ekonomi syariah sama saja dengan ekonomi konvensional, maka wajar umat muslim di Jambi mengalami dilema antara pilihan menggunakan sistem ekonomi syariah atau tidak. Hal inilah yang masih menjadi tugas dari MES dan semua pihak untuk bersama-sama mengarahkan persepsi mereka menuju masyarakat ekonomi syariah dengan cara terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

- b) *Aksesibilitas* masyarakat terhadap bank syariah. Adanya masyarakat ekonomi syariah (MES) melalui perbankan syariah maupun perusahaan jasa syariah yang sudah banyak berdiri di Kota Jambi sangat menolong sebagai sarana masyarakat dalam hal bermuamalah secara syariat Islam, dan mendapatkan potensi yang halal dalam hal menabung, berusaha, investasi dan aktivitas lainnya. Namun kenyataannya walaupun bank syariah atau lembaga non bank syariah yang banyak berdiri di Kalimantan Selatan masih ada saja pemerintah maupun oknum lain yang tetap mengakses atau menggunakan bank konvensional. Ini tandanya kurang dukungan dari semua pihak untuk membentuk masyarakat ekonomi syariah yang kaffah di Kalimantan Selatan, karena daerah ini mayoritas muslim yang potensi menjadikan ekonomi syariah itu kemungkinan besar bisa tercapai.

3. Kendala Masyarakat Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Fitri Durotul selaku Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Jambi beliau mengatakan:

“Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sudah merancang beberapa program untuk meningkatkan literasi keuangan Syariah di Jambi namun masih kurangnya optimalisasi dalam kepengurus yang membuat program kerja masih kurang maksimal”.

Namun, tidak dipungkiri pastilah hal tersebut memiliki hambatan. Hal tersebut berasal dari masyarakat itu sendiri, kepercayaan masyarakat akan literasi keuangan Syariah dan ekonomi Syariah masih kurang dan bahkan beberapa masyarakat mempercayai bahwa ekonomi Syariah dan Konvensional itu sama. Belum lagi kurang terjangkaunya informasi mengenai sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat ekonomi syariah di Provinsi Jambi ataupun hal yang lainnya mengenai kegiatan MES kepada masyarakat kalangan bawah⁹.

MES di Jambi membentuk program kerja guna untuk mendongkrak literasi masyarakat mengenai keuangan Syariah dan diharapkan nantinya akan mendongkrak *Market Share* dari peran MES itu sendiri. Seperti yang diketahui masyarakat masih menganggap ekonomi Syariah sama dengan ekonomi Konvensional.

Hal ini mengakibatkan masyarakat ragu-ragu untuk menggunakan produk keuangan Syariah. Belum lagi banyaknya stigma negatif mengenai keuangan Syariah yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat akan keuangan Syariah masih rendah. Butuh dukungan berbagai pihak untuk meluruskan pemahaman masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan Syariah. Agar masyarakat tidak selamanya menganggap hal tersebut dan masyarakat akhirnya tereduksi. Pemahaman masyarakat Indonesia mengenai literasi keuangan Syariah sangatlah penting. Literasi keuangan Syariah penting bagi masyarakat, masyarakat akan mampu mengelola keuangan untuk merencanakan keuangan dimasa depan baik bagi individu atau keluarga masing-masing individu. Karena dengan pemahaman literasi keuangan masyarakat akan sangat merasa perlu memiliki proteksi baik untuk diri sendiri ataupun bagi keluarga untuk kehidupan di masa depan yang sejahtera. Untuk mendorong peningkatan literasi keuangan Syariah di Indonesia sosialisasi serta edukasi harus terus dilaksanakan secara aktif, konsisten dan pastinya harus berkesinambungan.

Sosialisasi akan optimal jika seluruh pihak bersinergi untuk terus memacu program yang berkaitan dengan peningkatan literasi keuangan Syariah. Tentu hal ini diharapkan dapat menumbuhkan hal yang positif, tapi jika hanya satu pihak saja yang bergerak, maka peningkatan literasi tidak akan tumbuh secara harapan bahkan cenderung akan melambat nantinya. Konsistensi serta sinergitas antar berbagai pihak sangat penting disini guna mendongkrak pertumbuhan literasi Syariah yang nantinya akan berdampak positif kepada *Market Share* keuangan Syariah di Indonesia.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, tidak semua kegiatan MES dapat dilaksanakan. Ini juga merupakan hambatan bagi MES dalam meningkatkan literasi keuangan Syariah di Indonesia. Untuk saat ini, MES membatasi kegiatan yang bersifat tatap muka dan diganti dengan kegiatan yang bersifat online, mulai dari kajian hingga Webinar keuangan Syariah itu sendiri. Sekitar 85% kegiatan MES sekarang ini bersifat online. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengakses kegiatan tersebut dikarenakan tidak semua kondisi masyarakat itu sama. Masyarakat yang berada dikalangan menengah kebawah kemungkinan kesulitan mengakses informasi yang diberikan MES via online ini, sementara kegiatan *roadshow* MES yang menjadi andalan dalam meningkatkan literasi justru belum dapat dilaksanakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diberikan suatu kesimpulan yang berupa:

1. Mengambil kesimpulan bahwa MES harus lebih mengoptimalkan potensi wakaf di Indonesia, diantaranya terkait strategi pengembangan wakaf produktif dengan memanfaatkan transformasi digital

serta pembangunan ekosistem wakaf produktif yang komprehensif untuk pemberdayaan ekonomi umat.

2. Masyarakat Ekonomi Syariah telah banyak memberikan edukasi dan sosialisasi melalui dari peran masyarakat ekonomi syariah (MES) yang telah banyak memberikan edukasi dan sosialisasi dengan mengadakan melalui even-even seminar. Tujuan dari semua kegiatan ini tidak lain serta tidak bukan hanya satu yaitu ingin menjadikan suatu sarana masyarakat khususnya di Provinsi Jambi, setiap melakukan muamalah harus sesuai dengan syariat Islam karena masyarakat di Provinsi Jambi mayoritas muslim oleh karena itu, mempunyai potensi yang cukup besar.
3. Seperti yang diketahui masyarakat masih menganggap ekonomi Syariah sama dengan ekonomi Konvensional. Hal ini mengakibatkan masyarakat ragu- ragu untuk menggunakan produk keuangan Syariah, hal ini bisa menjadi hambatan masyarakat ekonomi syariah dalam membantu meningkatkan literasi keuangan syariah. Belum lagi banyaknya stigma negatif mengenai keuangan Syariah yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat masih rendah. Butuh dukungan berbagai pihak untuk meluruskan pemahaman masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan Syariah. Agar masyarakat tidak selamanya menganggap hal tersebut dan masyarakat akhirnya tereduksi.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Ekonomi Syariah

Terkait dengan kurang terjangkau informasi atau edukasi yang dilaksanakan oleh MES kepada kalangan masyarakat bawah, perlunya kiranya digencarkan kembali edukasi hingga sampai kepada semua lapisan masyarakat agar meratanya informasi dan edukasi mengenai literasi keuangan Syariah. Diperlukan juga inovasi kegiatan oleh MES dalam meningkatkan literasi keuangan Syariah selain dari *Roadshow*, karena *Roadshow* hanya dilakukan di Kota-kota besar, tidak mencapai Desa, perlunya dilakukan kegiatan yang sifatnya sederhana hingga sampai menjangkau Desa. Diperlukan juga kesolidan koordinasi antara pengurus pusat dengan pengurus wilayah atau daerah guna mempererat silaturahmi dan juga ketepatan sasaran dalam program peningkatan literasi keuangan Syariah di Indonesia tepatnya di Provinsi Jambi.

2. Bagi Masyarakat Umum

Untuk selalu mengikuti informasi mengenai kegiatan peningkatan literasi oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) baik via media sosial atau apapun. masyarakat juga diharapkan dapat mengikuti kegiatan tersebut agar menambah pengetahuan mengenai ekonomi dan keuangan Syariah serta tidak menggabaikan poster atau informasi dari teman terdekat atau kerabat yang mengetahui dan telah mengikuti kegiatan MES tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Badrus, S. Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang.
- (2) Hidayat. Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan. *IAIN Purwokerto* 2017.
- (3) Teuku Syifa Fadrizha Nanda. Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh. *UIN Ar-Rainy* 2019.
- (4) Sucipto. Wawancara Sekertaris MES, 2022.
- (5) Ningtuti, K. *Literasi Dan Inklusi Keuangan Indonesia*; PT Raja Grafindo Persada: Depok, 2018.
- (6) Sujarweni, W. *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*; PUSTAKA BARU PRESS: Yogyakarta, 2010.
- (7) Lexy J, M. *Metodologi Penelitian Kualitatif*; PTT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2019.
- (8) Rofiqoh. *Wawancara Sekertaris Lima MES Jambi*; 2022.
- (9) Durotul, F. *Wawancara Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Jambi*, 2022.